



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14608-14619

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Komite Sekolah dalam Mengevaluasi Mutu Pendidikan di SDN 19 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Indonesia

Betry<sup>1✉</sup>, Supratman Zakir<sup>2</sup>

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [betrympd@gmail.com](mailto:betrympd@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD N 19 Lima Kaum. Untuk mendapatkan jawaban permasalahan observasi maka dirumuskan 4 sub fokus yang akan diuji (1 ) Peran Komite sebagai Pemberi Penilaian (2 ) Peran Komite sebagai Pendukung (3 ) Peran Komite sebagai Pengawas (4 ) Peran Komite sebagai Mediator. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan beserta ketua komite sekolah Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumen mengumpulkan data dengan cara reduksi data, representasi data, penarikan kesimpulan atau analisa. Dari analisa tersebut menunjukkan hasil peranan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan SD 19 efektif karena Banyak pengurus dan anggota yang aktif, peranan panitia tersebut tetap berjalan baik sebagai pemberi penilaian, pendukung, pengawas maupun sebagai mediator sehingga berimplikasi pada pembangunan sarana dan prasarana yang awalnya kepengurusanya tidak efektif menjadi efektif dan efisien dalam kesolitud pembangunan sarana dan prasarana serta kurikulum di .SD 19 Lima Kaum.

Kata Kunci: *Evaluasi, Mutu Pendidikan*

## Abstract

This research aims to uncover problems related to the role of the school committee in improving the quality of education at SD N 19 Lima Kaum. To get answers to observation problems, 4 sub-focuses were formulated which will be tested (1) The role of the committee as an assessor (2) The role of the committee as a supporter (3) The role of the committee as a supervisor (4) The role of the committee as a mediator. Respondents in this study were school principals and heads of school committees. Meanwhile, data collection techniques using observation, interviews and document study collect data by means of data reduction, data representation, drawing conclusions or analysis. From this analysis, the results show that the role of the school committee in improving the quality of SD 19 education is effective because there are many administrators and members who are active, the role of the committee continues to function both as an assessor, supporter, supervisor and as a mediator so that it has implications for the development of facilities and infrastructure which initially had no management. effective to be effective and efficient in the joint development of facilities and infrastructure as well as the curriculum at SD 19 Lima Kaum.

Keywords: *Evaluation, Quality education*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan peran komite sekolah sangat variatif, Di satu pihak ada komite sekolah yang masih melanjutkan peran BP3 (*Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan*) yang sering disebut sebagai "*stempel*" kepala sekolah. Artinya, komite sekolah merujuk apa yang diprogramkan oleh kepala sekolah. Komite sekolah tidak memiliki ide kreatif dan gagasan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mutu pendidikan di SD 19 Lima kaum akan tetapi tiga tahunan terakhir ada beberapa perubahan signifikan dari segi sarana dan prasarana dan program ekstrakurikuler sekolah

Peran komite sekolah sebagai badan pengawasan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di beberapa sekolah keberadaan lembaga ini justru menjadi persaingan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah, awalnya di SD 19 Lima Kaum komite dan kepala sekolahnya tidak berperan aktif berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bangunan yang kurang bonafit, pengelolaan sampah yang yang tidak baik, dan vakumnya kegiatan ekstrakurikuler. Komite lembaga pendidikan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Lembaga pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan pralembaga pendidikan, jalur pendidikan lembaga pendidikan maupun pendidikan luar lembaga pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan sebagaimana tertuang dalam paradigma baru tri pusat pendidikan yaitu lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat bersama sama dalam mencapai tujuan pendidikan, Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai asas, dan tidaklah mengabaikan tanggung jawab sosial dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama membina dan mempertahankan kebaikan(Abdul Rahmat,2014)

Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar dimana manusia memiliki tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas, perasaannya, pikiran-pikirannya, keputusan-keputusannya dan maksud-maksudnya, sehingga mencakup masyarakat dan tempat interaksinya.

Keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki pola hubungan fungsional yang amat rapat, dan bahkan seharusnya bersatu padu secara bersama-sama dalam melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk komite sekolah SD 19 Piliang di dalamnya, secara formal difungsikan sebagai forum pengambilan keputusan bersama antara lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan SD 19 Lima Kaum.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Lembaga pendidikan adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu lembaga pendidikan(Afifuddin,2011)

Berdasarkan Kepmendiknas 044/U/2002, komite sekolah mengemban tempat peran sebagai berikut : (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.

Berdasarkan peran komite SD 19 Lima Kaum tersebut, maka pada tahap awal pembentukannya, komite sekolah disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite sekolah dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite sekolah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan bermamfaat yakni(Azyumardi Azra,1999)

(1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Peran komite SD 19 Lima Kaum dalam rangka memberikan dukungan dalam bentuk *finansial*, pemikiran maupun tenaga penyelenggara pendidikan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi anggota komite dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sehingga yang bekerja hanya pengurus komite saja, kemudian dalam hal pembangunan sarana dan prasarana SD 19 Lima Kaum masih kekurangan seperti ruangan belajar, lapangan olah raga dan gedung perpustakaan serta Aulanya. Keberadaan SD 19 Lima Kaum sampai saat ini mengalami perkembangan signifikan hal ini dapat terlihat dari kuantitas siswa yang masuk dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian akan diuraikan mengenai berbagai hal yang termasuk dalam metodologi penelitian dalam mendapatkan data objektif tentang bagaimana peran komite sekolah dalam mengevaluasi mutu pendidikan di SDN 19 lima kaum kabupaten tanah datar Indonesia (Olivia, 2003). Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan tentang program dan usaha komite sekolah dalam perencanaan dan penerapan program efektif sehingga dari segi kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana berkembang maju dan efektif dan efisien dalam menciptakan tujuan pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif karena dalam proses mendapatkan data yang bersifat opini, wacana dan jawaban jawaban lisan dibutuhkan instrumen yang bersifat kualitatif. Alasan penulis memakai jenis penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang akan penulis lakukan sesuai dengan ciri-ciri dari penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan Bogdan dan Biklen, yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: 1) memiliki latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kunci, 2) bersifat deskriptif, 3) peneliti-peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada hasil, 4) peneliti cenderung menganalisis data secara proses dari pada hasil, 4) peneliti cenderung menganalisis data secara induktif dan 5) makna menjadi perhatian dalam pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang akan penulis dapatkan adalah data qualitative menyangkut program komite sekolah dan dalam pengembangan programnya dari perencanaan,

pengorganisasian dan penerapan program komite sekolah tersebut, informan kunci dalam penelitian ini adalah komite sekolah sedangkan informan pendukung adalah guru dan kepala sekolah SDN 19 Lima kaum serta masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sanapiah Faisal, hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai patner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Untuk itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.

Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholders* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan.

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara stakeholder pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid dan masyarakat serta stakeholder lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan(Danny Meirawan,2010)

Menurut Asmoni komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generic. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekoah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikain, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai paduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 004/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.

Sedangkan menurut Masimangun komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Hal senada juga diungkapkan Asmoni yang mengungkapkan bahwa komite sekolah merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* (semua komponen) pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa .Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau

Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama. Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah(Agmarina, Z,2010)

Komite sekolah merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* (semua komponen) pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### 1. Kedudukan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah. Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (, hingga pendidikan menengah baik madrasah negeri maupun swasta. Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif yakni komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.

Terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang, tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat

dibentuk koordinator komite sekolah. Dengan cara tata kelola berjalannya organisasi komite sekolah dengan dibentuknya beberapa koordinator yang dibutuhkan dan siap berkoordinasi dengan ketua komite dan sekolah serta mampu menjalankan tugas yang efektif dan efisien guna kemajuan dan pengembangan sekolah(E Mulyasa,2005)

## 2. Peran dan fungsi komite ssekolah SD 19 Lima Kaum

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan(Hardman, M. L. et.al, 1990)

Pada organisasi sekolah, keberadaaan komite sekolah pada satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada prinsip yang yang harus di pegang oleh semua anggota komite sekolah, yaitu komite sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, dan tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi. Dengan kata lain, komite sekolah bergerak pada porosnya sendiri, yakni melakukan tugas sebagai sebuah komite.

Peran dan fungsi komite lembaga pendidikan adalah landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasinya. Komite lembaga pendidikan memiliki peran sebagai mitra kerja lembaga pendidikan (lembaga pendidikan), diantaranya adalah sebagai penasehat lembaga pendidikan, pendukung lembaga pendidikan, pengontrol, sebagai

penghubung dengan *stakeholders* pendidikan. Peran komite sekolah sebagai mediator meliputi mediator antara pemerintah (*executive*), dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan masyarakat di satuan pendidikan dan inilah yang di aplikasikan di SD 19 Lima Kaum (Kirk, S. A. & Gallagher, J. J, 1989)

### 3. Tujuan Komite SD 19 Lima Kaum

Komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan, Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Komite SD 19 Lima Kaum bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan (Departemen Agama, 2001)

Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Seluruh anggaran dan proses birokrasi guna pencapaian mutu dan kualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan, Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi lembaga

pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup *input*, *proses* dan *output* pendidikan. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan turut sertanya individu atau kelompok masyarakat dalam pengembangan sekolah. Selanjutnya peran komite sekolah adalah suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang dicapainya. Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting (Bunawan, L. & Yuwati, C. S, 2000).

Dibidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah, para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite sekolah tersebut dan hal inilah yang diaplikasikan selama tiga tahun terakhir di SDN 19 Lima Kaum sehingga meningkatnya pembangunan dengan contoh dibangunnya wc sebanyak 6 buah serta dibelinya peralatan drum band serta di rehapnya seluruh local dan dibuatnya musala (Departemen Agama, 2009).

## SIMPULAN

Peran Komite SDN 19 lima kaum sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite sekolah aktif dengan konsep organisasi yang memakai sistem kerja kolektif dan pengamanahan deskripsi kerja kepada mandat mandat yang telah disetujui antara sekolah, ketua komite dan masyarakat. Dan didukung dengan kontrol masyarakat yang kuat terhadap lingkungan interaksi siswa di tengah masyarakat lima kaum sehingga terjalinnya tim yang solid. Peran Komite SDN 19 lima kaum Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) cukup dirasakan

oleh lembaga dengan memfasilitasi aspirasi masyarakat baik dalam bentuk standar mutu ke madrasah maupun pelayanan serta perjuangan tim komite dalam pengembangan fisik sekolah dan kelengkapan sarana dan prasarana dan menanamkan citra kepada masyarakat lima kaum bawaha SDN 19 Lima Kaum milik masyarakat dan memajukannya bersama sama dengan masyarakat dengan mensuport memprogramkan beasiswa bagi anak nagari lintau buo dengan mencarikan donatur donatur ke perantua di luar daerah sebagai pembantu masyarakat dalam mensukseskan pendidikan di lima kaum. Peran Komite SDN 19 Lima Kaum Sebagai Pengontrol (Controlling Agency) berjalan efektif dimana komite sebagai badan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pesantren berjalan dengan lancar dilihat dari beberapa program yang telah terealisasi dengan baik. Peran Komite SDN 19 Lima Kaum Lintau Sebagai Mediator sudah baik dengan sehingga Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau mendapatkan bantuan dari berbagai pihak .dan dana tersebut dikelola oleh sekolah dengan transparansi kepada pihak komite dan masyarakat. Setiap pembangunan sekolah di prakarsai oleh lembaga dengan bantuan komite dan masyarakat lintau buo dan perangkat kepemudaan nagari terjun dalam gotong royong pembangunan sekolah. Jadi bisa ditarik kesimpulan peran komite SDN 19 Lima Kaum sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau efisien dalam menjalankan organisasi komite sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat. Public Relations For School. Bandung: MQS Publishing, 2009
- Afifuddin, Bahan Perkuliahan Manajemen Madrasah, Bandung: Pascasarjana UIN, 2011
- Agmarina, Z. (2010). Hubungan dukungan sosial teman sebaya reguler dengan penyesuaian sosial pada siswa kelas enam akselerasi sd bina insani hubungan masyarakat jurnal v 3
- Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta; logos na ilmu, 1999, cet.1
- Bunawan, L. & Yuwati, C. S. (2000). Komite Sekolah Dasar Efektif. Jakarta: Yayasan Santi Rama. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991) jurnal v5.
- Danny Meirawan, Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Masa Depan, Bandung: IPB Press, 2010
- Departemen Agama, Al – Alyy Al-Qur’an dan terjemahannya
- Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Buku 1). Jakarta : Depdiknas. Sambasalim.2009. Mutu Pendidikan. <http://sambasalim.com>.

E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung : Rosda Karya, 2005

Hadari Nawawi. Kepemimpinan yang Efektif, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1987

Hardman, M. L. et.al. (1990). Human Exceptionality (third ed.). Massachusetts: A Division of Simon & Schuster Inc.jurnal; v2

Hasbullah, Otonomi Pendidikan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

KemenDik Nas, 1990 dan 2006

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Kirk, S. A. & Gallagher, J. J. (1989). Education Exceptionality Children (sixth ed.).Boston: Houghton Mifflin Company journal six5

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung : Rosda Karya, 2004